



**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, semi-transparent, 3D rectangular blocks in shades of blue and grey, creating a layered, architectural effect.

2012

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2012

Dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 berikut perubahannya pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 serta telah dirubah dengan Surat Edaran No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka setiap perusahaan khususnya perbankan wajib melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap kegiatan usahanya serta pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Disamping untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Bank, menjaga kepercayaan para Pemegang Saham, Kreditur, Nasabah, Karyawan serta melindungi kepentingan *stakeholders*.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT Bank Index Selindo terus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan Bank sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

- **Transparansi (Transparency)**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas (Accountability)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- **Pertanggungjawaban (Responsibility)**, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- **Independensi (Independency)**, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- **Kewajaran (Fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut diharapkan PT. Bank Index Selindo mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal perbankan yang semakin kompleks dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja Bank.

Selama tahun 2012, Bank Index telah mengupayakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan bank, antara lain melalui :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Dalam rangka Pelaksanaan GCG tersebut Bank Index telah melakukan self assessment untuk periode Desember 2012 secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang sehat, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

A. Transparansi Pelaksanaan GCG :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan pengurus Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

| <i>Dewan Komisaris</i> | |
|---|---|
| Presiden Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris | Timoty E. Marnandus Alwi Setiawan Arief Effendie Bosur Simatupang Joko Setiawan |

| <i>Direksi</i> | |
|---|---|
| Presiden Direktur Direktur Bisnis Support Direktur Operasi Direktur Pengembangan Bisnis Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan | Charlie Paulus Jusuf Lukito Andreas Danny Soesanto Ationo Teguh Basuki Daniel Satyawan Soesilo Basoeki |

Jumlah Dewan Komisaris Bank Index ada 5 (lima) orang, 60% (enam puluh persen) nya adalah Komisaris Independen sedangkan jumlah Direksi ada 6 (enam) orang sehingga jumlah Direksi melebihi jumlah Komisaris dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Index serta telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 berikut perubahannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi minimum 3 (tiga) orang dimana jumlah Dewan Komisaris tidak boleh melampaui jumlah anggota Direksi.

Mayoritas anggota Direksi Bank Index tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham. Walaupun ada hubungan keluarga antara Direktur Bisnis Support, Jusuf Lukito dengan Komisaris Alwi Setiawan dan Joko Setiawan, dimana Direktur Bisnis Support adalah saudara sepupu dari Komisaris (Joko Setiawan) dan keponakan dari Wakil Presiden Komisaris (Alwi Setiawan), namun demikian masing-masing mampu bertindak independen dalam hal pengambilan keputusan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi selalu memberikan pengarahannya bahwa GCG merupakan salah satu prinsip praktek perbankan yang sangat penting untuk memperkuat kondisi internal Bank dan merupakan praktek tata kelola perbankan yang harus dilaksanakan agar tata kelola bank menjadi sehat dan kompetitif.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Memperhatikan dan menindaklanjuti laporan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup dalam hal pengarahan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank yang tertuang dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap semester. Berdasarkan hasil pengamatan Dewan Komisaris selama ini, manajemen Bank Index selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian dan profesional, memiliki track record kinerja yang baik, independen serta mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal yang sangat cepat. Dalam menjalankan kegiatan operasional, Manajemen senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan secara bertahap terus menerapkan praktek tata kelola yang baik, sehingga kinerja Bank Index selama tahun 2012 sangat baik serta tercapainya target sebagian besar kinerja dari Rencana Bisnis Bank pada tahun 2012, walaupun ada sebagian kinerja yang belum mencapai target tetapi masih dalam batas wajar dan tidak membahayakan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

Sehubungan dengan kinerja Bank Index tersebut, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi selama tahun 2012, antara lain adalah :

1. Rapat Kerja Nasional Bank Index Selindo di Hotel Santika, Jakarta, 28 Januari 2012.
2. Penarikan Undian Hadiah Tabungan Bank Index, 10 Februari 2012.
3. Officer Development Program (ODP), 23 April 2012.
4. Peresmian Pembukaan Bank Index Selindo KCP Pesanggrahan, Jakarta, 30 Mei 2012.
5. Customer Gathering, Jakarta, 30 Mei 2012
6. Peningkatan modal disetor dari Rp. 160.001.000.000 (seratus enam puluh milyar satu juta rupiah) menjadi Rp. 185.001.000.000 (seratus delapan puluh lima milyar satu juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2012. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2012 modal disetor ditingkatkan lagi menjadi Rp. 205.001.000.000 (dua ratus lima milyar satu juta rupiah).
7. Bakti sosial Bank Index terhadap korban banjir kepada warga Tanjung Priuk berupa pembagian sembako, Jakarta, 30 Juni 2012.
8. Relokasi Bank Index Selindo KCP Dutamas, Jakarta, 16 Juli 2012.
9. Penandatanganan kerja sama dengan PT. Commonwealth Life dalam rangka peluncuran produk Bancassurance (Tabungan Idaman) sekaligus peluncuran produk Tabungan Idaman, Jakarta, 16 Juli 2012.
10. Employee Gathering dalam rangka HUT Bank Index yang ke 19 tahun, yang dilaksanakan di Agro Wisata Gunung Mas, Cisarua, Bogor, 8 September 2012.
11. Bakti sosial Bank Index kepada Panti Asuhan Darmajati berupa pemberian sembako dan beasiswa, Denpasar, 21 Desember 2012.

Pengawasan Komisaris terhadap Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit, baik audit internal, auditor eksternal maupun audit oleh Pengawas Bank (Bank Indonesia) yang telah dilaksanakan sesuai dengan saran-saran perbaikan yang ditemukan.

Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada tata tertib kerja komisaris yang mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pedoman, Uraian dan Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) Bank Index.

Dalam pelaksanaan GCG periode Desember 2012, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di Bank Index terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.

Direksi

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan bank maupun kewajiban mengelola bank sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Job Description serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam :

- ▶ Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- ▶ Direksi selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dan rekomendasi satuan audit intern bank, auditor eksternal serta hasil pengawasan dari Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- ▶ Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- ▶ Direksi telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat semua anggota.
- ▶ Mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai baik secara langsung maupun melalui email.
- ▶ Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Presiden Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi melalui Rapat Komisaris dan dituangkan dalam Notulen Rapat, tentang pelaksanaan GCG kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga prinsip-prinsip GCG tercermin dalam setiap kegiatan usahanya.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Bank Index telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada Juni 2007 dan telah dirubah/direvisi pada Juli 2008 dan September 2008 serta Oktober 2008 sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada April 2008 dan telah direvisi pada Juli 2008 dan September 2008. Kemudian Sesuai persetujuan dan pengesahan dari Bank Indonesia pada bulan Oktober 2011, serta SK Direksi Bank Index akhir Desember 2011, maka berlaku efektif perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, yakni Bapak Joko Setiawan (Komisaris) yang menggantikan Bapak Alwi Setiawan (Wakil Presiden Komisaris) sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing.

Sedangkan Komite Remunerasi & Nominasi dibentuk tidak terpisah dan diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif Bank Index (Kepala Divisi SDM).

Adapun susunan Komite-komite Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

| <i>Komite Audit</i> | |
|---|--|
| Ketua | Timoty E. Marnandus (Komisaris Independen) |
| Anggota | Joko Apriliando (Pihak Independen) |
| Anggota | Sugito Wibowo (Pihak Independen) |
| <i>Komite Pemantau Risiko</i> | |
| Ketua | Arief Effendie (Komisaris Independen) |
| Anggota | Entjun Mansur (Pihak Independen) |
| Anggota | Kadirun Yusuf Landau (Pihak Independen) |
| <i>Komite Remunerasi & Nominasi</i> | |
| Ketua | Bosur Simatupang (Komisaris Independen) |
| Anggota | Joko Setiawan (Komisaris) |
| Anggota | Soemartanto Soemanto (Kepala Divisi SDM) |

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

c. Frekuensi Rapat Komite

Komite Audit

| <i>Nama</i> | <i>Jumah Rapat</i> | <i>Kehadiran</i> |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| Timoty E.Marnandus | 5 | 5 |
| Joko Apriliando | 5 | 5 |
| Sugito Wibowo | 5 | 5 |

Komite Pemantau Risiko

| <i>Nama</i> | <i>Jumah Rapat</i> | <i>Kehadiran</i> |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Arief Effendie | 5 | 5 |
| Entjun Mansur | 5 | 5 |
| Kadirun Yusuf Landau | 5 | 5 |

Komite Remunerasi & Nominasi

| <i>Nama</i> | <i>Jumah Rapat</i> | <i>Kehadiran</i> |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Bosur Simatupang | 4 | 4 |
| Soemartanto Soemanto | 4 | 4 |
| Joko Setiawan | 4 | 4 |

d. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Program kerja Komite di Bank Index sudah tercantum dalam "Pedoman Kerja Komite-komite" yang menegaskan bahwa :

- ▶ Rapat dan pertemuan anggota Komite akan diselenggarakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dengan waktu dan tempat akan ditetapkan oleh Ketua Komite. Selama tahun 2012 rapat Komite Audit telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dan dihadiri oleh semua anggota Komite yaitu pada bulan April 2012, Juni 2012, Oktober 2012 dan bulan Desember 2012. Sedangkan rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Februari 2012, Mei 2012, Juli 2012, September 2012 dan Desember 2012 serta dihadiri oleh semua anggota Komite. Untuk rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh semua anggota Komite yaitu pada bulan Januari 2012 dan bulan Juli 2012.
- ▶ Agenda/acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota Komite lainnya.
- ▶ Rapat dan pertemuan Komite hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite. Mayoritas rapat Komite pada tahun 2011 dihadiri oleh semua anggota Komite.
- ▶ Hasil rapat/pertemuan dicatat dalam notulen dan dibagi-bagikan kepada semua anggota Komite sebagai laporan serta telah didokumentasikan dengan baik.
- ▶ Ketua Komite masing-masing wajib memberikan rekomendasi langsung kepada Komisaris paling kurang pada setiap akhir tahun mengenai hasil pengamatan/monitoring Komite atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya serta usul dan pendapat mengenai usaha-usaha perbaikan yang perlu dilaksanakan. Untuk periode tahun 2012, rekomendasi dimaksud telah disampaikan pada Dewan Komisaris dalam bentuk Memo Internal.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk menjamin efektivitas kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Index telah mempunyai Direktur Kepatuhan serta membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dengan SDM yang kompeten dibidangnya.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan telah berjalan efektif yang tercermin dari kepatuhan bank yang tergolong baik walaupun pernah terjadi pelanggaran yang tidak material atas ketentuan Bank Indonesia dan Undang-Undang yang berlaku namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan pada masa triwulan laporan sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan kepada tingkat kesehatan dan kondisi bank secara keseluruhan, begitu juga kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia dan otoritas lain.

Dalam memastikan kepatuhan Bank dan pengawasan terhadap risiko kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang fungsi dan kedudukannya independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan kerja Kepatuhan memberikan opini dan rekomendasi kepatuhan untuk kepentingan Bank, melakukan review atas pedoman dan prosedur kerja agar selalu up to date, relevan dan tidak melanggar ketentuan serta memenuhi GCG serta mensirkulasikan dan mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan dalam perusahaan.

Selain itu Direktur Kepatuhan juga dibantu oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dalam rangka menerapkan dan memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan PBI No. 11/28/PBI/2009, 1 Juli 2009 dan SE BI No. 11/31/DPNP, 31 November 2009 serta Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka menilai seluruh aspek kegiatan operasional sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku serta agar bank tetap sehat dan mampu berkembang maka Bank senantiasa melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan menyeluruh pada semua bidang, untuk itu Bank Index telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional serta membentuk unit Kontrol Internal (UKI). Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme organisasi dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada standar fungsi audit intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern serta praktek tata kelola perbankan (GCG) yang sehat. Aktivitas SKAI mencakup bidang-bidang operasional, kredit, Teknologi Sistem Informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, property dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun, seperti tercantum dalam Audit Charter. Selanjutnya Direksi segera menindaklanjuti rekomendasi serta hasil temuan dari SKAI tersebut.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Untuk menjamin efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang dihadapi serta pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan SDM yang kompeten dibidangnya.

Satuan Kerja ini aktif dalam menjalankan fungsinya antara lain :

- ▶ Mengimplementasikan dan memantau penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
- ▶ Memantau posisi risiko dan melakukan stress testing untuk mengetahui dampaknya terhadap kinerja dan pendapatan Satuan Kerja Operasional.
- ▶ Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko / komposisi risiko kepada Manajemen dan kepada Bank Indonesia.
- ▶ Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari kebijakan dan pedoman strategi penerapan Manajemen Risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko.
- ▶ Menyusun SOP Manajemen Risiko yang selalu direvisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ▶ Dalam hal adanya pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru, dilakukan identifikasi pengukuran dan pemantauan seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain tercermin dalam :

- ▶ Bank telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko seperti Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik serta telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang selalu dievaluasi secara berkala dan konsisten.
- ▶ Dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru Direksi telah memastikan dilakukannya proses identifikasi atas seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru tersebut.
- ▶ Direksi telah memastikan penempatan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai per produk, jenis risiko dan aktifitas fungsional yang tertuang dalam SK & SE Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.
- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Index pada khususnya.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi dan pengukuran risiko telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha bank, yaitu mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Secara umum pengawasan aktif manajemen dan pemantauan risiko telah berjalan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dan sesuai dengan tata kelola yang sehat.

d. Sistem Pengendalian Intern

Manajemen telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (unit kerja Manajemen Risiko dan SKAI), serta telah menerapkan fungsi *dual control* dalam setiap kegiatan operasional Bank. Disamping itu juga SKAI telah melaksanakan fungsi audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktifitas fungsional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

- a. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian serta tidak ada konsentrasi kredit kepada nasabah tertentu (diversifikasi penyediaan dana merata).
- b. Pengambilan keputusan penyediaan dana nasabah inti dan kepada nasabah terkait dilakukan secara independen.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp. 3.274.803,50 juta, adalah sebagai berikut :

| No. | Penyediaan Dana | Debitur | Jumlah | |
|-----|--------------------------------|---------|--------|----------------------------|
| | | | | Nominal (Jutaan Rupiah) |
| 1. | Kepada Pihak Terkait | 12 | | 353.810* |
| 2. | Kepada Debitur Inti (25 Besar) | | | |
| | a. Individu | 15 | | 298.848,88 |
| | b. Group | 10 | | 416.096,68 |

* Merupakan fasilitas back to back (cash loan) sebesar Rp. 431.825 juta

6. Rencana Strategis Bank

- Rencana strategis bank, baik jangka panjang, jangka menengah dan pendek telah disusun dalam bentuk Corporate Plan (*Long Term Strategic Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi bank masing-masing untuk periode 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun.
- Rencana Bisnis disusun realistis dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas-azas perbankan yang sehat.
- Realisasi rencana bisnis sangat sesuai dengan rencana bisnis bank meskipun ada sedikit deviasi yang tidak material.
- Low Strategic Risk Rating* (peringkat 1).

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Laporan keuangan dipublikasikan melalui media harian Bisnis Indonesia setiap triwulan dan secara transparan juga bisa dilihat pada website Bank Index www.bankindex.co.id.
- Laporan keuangan dan non keuangan Bank telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darmawan, Hendang & Yogi, serta telah terdaftar di Bank Indonesia.
- Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Tahunan serta telah disampaikan kepada beberapa lembaga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Jumlah saham Bank Index yang telah ditempatkan dan disetor penuh untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah sebesar 205.001 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 205.001 juta. Dari jumlah tersebut sebesar 3,75 % atau 3.750 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.750 juta dimiliki oleh Alwi Setiawan selaku Wakil Presiden Komisaris. Sedangkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris Bank Index pada bank dan beberapa perusahaan lainnya yang mencapai 5 % (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Perusahaan | % Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Alwi Setiawan (%) | % Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Joko Setiawan (%) |
|-----|---------------------------|---|---|
| 1. | PT. Jaya Segara Lestari * | 80 | - |
| 2. | PT. Asseta Selindo | 75 | - |
| 3. | PT. Taman Bogor Indah * | 30 | - |
| 4. | PT. Taman Mekaraya * | 30 | - |
| 5. | PT. Era Raya Land * | 30 | - |
| 6. | PT. Kurnadi Abadi | 25 | - |
| 7. | PT. Kekaraya Asasetiawan | 25 | - |
| 8. | PT. Kerta Mulya Saripakan | 25 | 12,50 |
| 9. | PT. Caturputra Gemilang | 25 | 15 |
| 10. | PT. Kerta Mulya Sukses | 25 | - |
| 11. | PT. Kerta Mulya Sembada | 25 | - |
| 12. | PT. Kerta Mulya Selindo * | 25 | - |
| 13. | PT. Kerta Mulya Semesta * | 25 | 5 |
| 14. | PT. Megaraya Sejahtera * | 25 | - |
| 15. | PT. Interalia Hotelindo * | 25 | - |
| 16. | PT. Interalia Semesta * | 25 | - |
| 17. | PT. Karya Agro Selindo * | 22,50 | - |
| 18. | PT. Sentra Usahatama Jaya | 10 | 6 |
| 19. | PT. Adhidaya Nusa Prima | - | 40 |
| 20. | PT. Kazanah Indexindo | - | - |

*) Non Aktif

Sedangkan untuk Direksi Bank Index tidak ada yang memiliki saham mencapai 5 % atau lebih dari modal yang disetor baik pada bank maupun pada perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank di Bank Index, namun ada hubungan keluarga antara Wakil Presiden Komisaris (Alwi Setiawan) dengan anggota Komisaris (Joko Setiawan) dimana Wakil Presiden Komisaris (Alwi Setiawan) adalah paman dari anggota Komisaris (Joko Setiawan) dan juga paman dari Direktur Bisnis Support (Jusuf Lukito), sehingga anggota Komisaris (Joko Setiawan) adalah sepupu dari Direktur Bisnis Support (Jusuf Lukito).

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Jenis Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

| <i>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain</i> | <i>Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun</i> | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | <i>Dewan Komisaris</i> | | <i>Direksi</i> | |
| | <i>Orang</i> | <i>Jutaan Rp.</i> | <i>Orang</i> | <i>Jutaan Rp.</i> |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 5 | 1.177 | 6 | 4.619 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) : | | | | |
| a. Dapat dimiliki | | | | |
| b. Tidak dapat dimiliki | | | | |
| | 5 | - | 6 | 168 |

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

| <i>Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun (Yang Diterima Secara Tunai)</i> | <i>Jumlah Komisaris</i> | <i>Jumlah Direksi</i> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar | - | - |
| Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar | - | 4 |
| Rp. 500 juta ke bawah | 5 | 2 |

E. Shares Option

Sejauh ini Bank Index belum mempunyai paket/Kebijakan Shares Option (nihil). Sebagai penggantinya adalah bonus kepada semua pegawai berdasarkan penilaian prestasi kerjanya yang dinilai setiap semester dan pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan setiap awal tahun dan diperhitungkan setelah neraca akhir tahun selesai.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sangat berfluktuasi mengingat penentuan gaji didasarkan atas negosiasi antara manajemen dengan pegawai.

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah yaitu 79 : 1.
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah yaitu 2,5 : 1.
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah yaitu 2,75 : 1.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi yaitu 2,5 : 1.

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris di tahun 2012 diselenggarakan 8 (delapan) kali yaitu pada bulan Januari 2012, Februari 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Agustus 2012, Oktober 2012 dan bulan November 2012 serta telah diikuti oleh semua anggota Komisaris.

| <i>Nama</i> | <i>Jumah Rapat</i> | <i>Kehadiran</i> |
|---------------------|--------------------|------------------|
| Timoty E. Marnandus | 8 | 8 |
| Alwi Setiawan | 8 | 8 |
| Arief Effendie | 8 | 8 |
| Bosur Simatupang | 8 | 8 |
| Joko Setiawan | 8 | 8 |

H. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Dalam tahun 2012 tidak ada penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Index yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan.

I. Permasalahan Hukum

Pada akhir tahun 2012 tidak terdapat perkara perdata yang dapat menimbulkan tagihan/kewajiban kontinjen.

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Jumlah transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode tahun 2012 adalah sebesar Rp.1,86 milyar yang merupakan transaksi sewa gedung kantor Bank Index Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional Thamrin serta Kantor Kas Menara Thamrin kepada Group. Walaupun demikian tarif yang berlaku adalah normal sama dengan tarif yang berlaku kepada pihak Lain sehingga mampu menghindari terjadinya benturan kepentingan. Selain itu terdapat pada penyediaan dana pada pihak terkait sebesar Rp. 353.810 juta dimana sebesar 99,93 % adalah *back to back* serta tidak pernah melampaui BMPK.

K. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi Bank*

Bank Index merupakan perusahaan yang belum menjual saham kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi sehingga tidak ada transaksi *buy back shares* atau *buy back obligasi* yang dilakukan oleh bank.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2012 untuk eksternal telah dilaksanakan 2 (dua) kali sepanjang tahun 2012 yaitu kepada warga Tanjung Priuk – Jakarta pada tanggal 30 Juni 2012 yang berupa pembagian sembako dalam rangka membantu korban banjir. Selain itu juga adanya sumbangan dukacita bagi orang tua karyawan yang meninggal dunia dan pemberian beasiswa sebagai penghargaan bagi

anak-anak karyawan yang berprestasi. Untuk pemberian dana bagi kegiatan politik selama periode tahun 2012 tidak ada.

M. Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

Manajemen Bank Index telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik sehingga secara konsolidasi termasuk Peringkat 1 (satu)**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank Index.

Pelaksanaan GCG Bank Index didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup :

A. Governance Structure

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Direksi telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Index serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank Index telah mempunyai Komite Audit, Komite Pemantau Resiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana semua kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite tersebut telah sesuai dengan PBI GCG, komposisi dan kompetensi komite-komite sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
4. Direksi Bank Index telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Resiko (SKMR) yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bank Index telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang cukup sebagai pedoman operasional Bank dengan didukung oleh sistem informasi Manajemen yang memadai.

Kelemahan dalam aspek *governance structure* Bank Index adalah :

1. Adanya rangkap jabatan salah seorang Komisaris pada perusahaan bukan lembaga keuangan lain, namun pada triwulan pertama tahun 2013 Yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Bank Index.

B. Governance Process

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dan memenuhi PBI tentang GCG, telah berjalan efektif walaupun masih terdapat kelemahan minor namun telah diselesaikan pada periode penilaian berikutnya.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan PBI dan prinsip-prinsip GCG serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas serta penyelenggaraan rapat komite-komite telah berjalan efektif dan efisien serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
4. Fungsi Kepatuhan Bank telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
5. Audit Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan obyektif serta sesuai dengan prinsip GCG.

Kelemahan dalam aspek *governance process* Bank Index adalah :

1. Meskipun fungsi Kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG namun pernah terjadi adanya pelanggaran yang sifatnya tidak material namun telah diselesaikan pada masa triwulan berikutnya dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Bank Index telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu serta telah disajikan dalam website Bank Index : www.bankindex.co.id.
2. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan bank sangat memadai dimana hampir sebagian besar realisasi kinerja Bank Index pada periode Desember 2013, melebihi target rencana Bisnis bank dengan profil risiko low.
3. Bank Index tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK serta pelanggaran terhadap ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.
4. Kepatuhan Bank Index terhadap peraturan perundang-undangan selama ini sangat baik dan belum pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

5. Bank selalu mematuhi peraturan sehingga Bank Index mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif sehingga pengelolaan benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
6. Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, Bank Index telah memiliki call center sehingga pengaduan nasabah dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti penyelesaiannya. Bank Index juga selalu memantau dan mengevaluasi laporan penyelesaian tentang keluhan dan pengaduan nasabah secara berkala melalui unit UPPN (Upaya Penanganan Pengaduan Nasabah) sehingga penyelesaian pengaduan nasabah dapat diselesaikan tanpa adanya mediasi.

Kelemahan dalam aspek *governance outcome* Bank Index adalah :

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dalam aspek *governance outcome* di Bank Index.

Jakarta, Desember 2012
PT. Bank Index Selindo



Timoty E. Marnandus
Presiden Komisaris

Charlie Paulus
Presiden Direktur